

PROPEMPERDA

2024

KEPDPRD NOMOR 17 /DPRD.LPG/III.01/2024, 3 HLM

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung dalam menyusun dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Program ini bertujuan untuk merencanakan pembentukan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan hasil musyawarah, pengkajian, dan penilaian terhadap kebutuhan hukum di tingkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Tujuan dari keputusan ini adalah memastikan pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Lampung dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas legislasi daerah, serta memastikan harmonisasi antara peraturan daerah dengan kebijakan nasional

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2024.